

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN *LINK AND MATCH* PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh: Sumarno ¹

Pendahuluan

1. *Link and Match* sebagai Konsep

Sebagai konsep *link and match* bukan lagi sesuatu yang baru; jauh sebelumnya sudah dikenal konsep relevansi. Salah satu hal yang menjadikan krisis dalam dunia pendidikan adalah dirasakannya kurang ada relevansi antara layanan yang disediakan oleh pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Relevansi mengandung aspek kuantitatif, misalnya seberapa banyak guru SMP yang harus dihasilkan oleh LPTK, seberapa banyak insinyur listrik yang harus dihasilkan oleh fakultas teknik, dan sebagainya. Relevansi juga mengandung aspek kualitatif, misalnya bagaimana kualifikasi teknisi bangunan untuk lima tahun mendatang, bagaimana kualifikasi guru sekolah dasar, dan sebagainya. Berkembangnya perencanaan pendidikan dengan pendekatan kebutuhan tenaga kerja (*manpower requirement approach*) merupakan salah satu refleksi dari berkembangnya konsep relevansi pendidikan. Konsep relevansi ini populer dalam konteks bahwa sebelumnya terjadi ledakan kebutuhan pendidikan sampai melampaui batas kewajaran, berkembang

Sumarno adalah staf pengajar pada Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP YOGYAKARTA

sebagai penyakit diplomaisme, yang diungkapkan oleh Ronald Dore tahun 1970-an.

2. *Link and Match* sebagai Kebijakan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berinisiatif mengangkat konsep *link and match* sebagai salah satu kebijaksanaan strategis untuk pembangunan pendidikan Indonesia dipertimbangkan sangat cocok untuk era pembangunan mendatang. Berdasarkan kebijaksanaan *link and match* telah lahir berbagai kebijaksanaan operasional seperti: sistem ganda dalam pendidikan teknologi dan kejuruan, pendidikan keterampilan di sekolah umum, dan sebagainya. Dengan sistem ganda tersebut menjadi jelas bagaimana caranya agar supaya teknisi yang dihasilkan lembaga pendidikan sangat sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Tidak saja cukup dengan pembaharuan kurikulum, akan tetapi lembaga kerja seperti industri terlibat secara langsung dalam proses pendidikan calon teknisi, dengan memberikan kesempatan magang, atau bentuk lain yang memungkinkan para siswa calon teknisi tersebut mengenal, mencoba, dan terlibat langsung dalam proses industri.

3. Peran Serta Masyarakat

Jauh sebelum Republik ini lahir, peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan sudah ada dan secara sosial kultural mengakar dalam masyarakat. Pesantren yang tidak terhitung jumlahnya, Taman Siswa, merupakan bentuk peran serta masyarakat yang sangat nyata sumbangannya dalam khasanah pendidikan nasional. Gotong royong pembangunan gedung, bahkan mendirikan sekolah dan madrasah, sudah dirasakan merupakan kewajiban masyarakat untuk berperan aktif. Sementara orang mengamati gejala aneh, pada waktu pemerintah di

dekade tujuh-puluhan memiliki kemampuan untuk membangun gedung sekolah dalam jumlah yang sangat banyak, masyarakat merasa tanggung jawab mereka sudah ada yang mengambil alih, sehingga mengendorkan sementara kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam pendidikan. Kemudian lahirlah upaya menggugah lagi semangat masyarakat untuk berperan serta dalam pendidikan; misalnya Proyek peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya pendidikan (COPLANER) sejak 1991, dan lahirnya PP No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan. Dalam cakupan yang lebih luas, kebijakan pembangunan nasional juga secara lebih terencana menggalang peran serta masyarakat, sumber dana masyarakat yang akhirnya juga akan kembali ke masyarakat.

4. Permasalahan

Dengan latar belakang tersebut permasalahannya adalah:

- a. Bagaimana konsekuensi kebijakan *link and match* bagi Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Bagaimana menumbuh-kembangkan kebutuhan peran serta masyarakat dalam menunjang implementasi dan operasionalisasi kebijakan *link and match*.
- c. Bagaimana pelebagaan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam konteks kebijakan *link and match*.

Pendidikan Nasional

1. Teoritik Konseptual

Uraian berikut ini memakai pendekatan sistem untuk mengidentifikasi indikator dari output yang diharapkan, konsekuensinya bagi proses, dan bagi input dari penyelenggaraan sistem pendidikan nasional; dengan pendekatan mikro maupun dengan pendekatan makro. Konsep *link and match* menghendaki pendidikan yang mampu:

- a. menghasilkan lulusan dengan kualifikasi yang memenuhi tuntutan masyarakat dan dunia kerja;
- b. menghasilkan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi (ristek) yang secara langsung dan tidak langsung bermanfaat bagi pembangunan;
- c. memberikan layanan pada masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

Butir b dan c terutama berlaku bagi perguruan tinggi.

Output yang demikian hanya dapat dihasilkan bila dilakukan pembenahan dan pembaharuan dalam hal:

- a. kurikulum dan proses belajar mengajar;
- b. kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan;
- c. program-program pengabdian pada masyarakat.

Kalau dilacak mundur selanjutnya mudah difahami bahwa pembaharuan dalam proses dan kegiatan membutuhkan berbagai kategori sumber daya, yakni sumber daya untuk pendidikan, sumber daya untuk riset, dan sumber daya untuk pengabdian pada masyarakat; baik berupa manusia, dana, maupun fasilitas.

Dengan pola fikir yang demikian kita dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk peran serta masyarakat yang diarahkan untuk membantu memperbaiki input (sumber daya pendidikan, riset, dan pelayanan),

atau proses (implementasi kurikulum, riset dan pengembangan atau pun pelaksanaan program layanan pada masyarakat dari masyarakat). Seberapa jauh peran serta masyarakat dapat akses terhadap faktor input saja atau dapat sampai pada proses, sangat bergantung pada proses-proses pelembagaan dan kemampuan masyarakat, serta peluang yang potensial dalam sistem kebijakan dan birokrasi. Oleh karena itu dalam bagian berikut dibicarakan aspek kebijaksanaan dan kelembagaan yang ada.

2. Kebijakan dan Infrastruktur Kelembagaan

Kebijakan *link and match* dicanangkan dalam iklim politik yang sangat kondusif untuk implementasinya. Misalnya dengan masuknya warna kebijaksanaan tersebut ke dalam GBHN 1993 dan PELITA VI, serta hasil Rakernas Dikbud 1994, dan peraturan/ketetapan pemerintah lainnya, merupakan modal yang sangat strategis untuk merintis hubungan kerja sama yang efektif, baik diantara unsur-unsur dalam Depdikbud sendiri, maupun dengan unsur lain dari luar Depdikbud, termasuk dengan sektor swasta dan dunia usaha. Misalnya kerja sama Depdikbud dengan Depnaker dalam hal pelatihan tenaga terampil, dengan Departemen Perindustrian dalam hal penelitian pengembangan. Langkah-langkah strategis di tingkat pusat tersebut tentunya diteruskan dengan kegiatan operasional di daerah. Peraturan Pemerintah tentang otonomi daerah juga telah mengatur dengan memberi kewenangan kepada kepala daerah untuk melakukan koordinasi di antara instansi vertikal di daerah.

Meskipun demikian tidaklah selalu mudah untuk merintis kelembagaan baru di tengah sistem kelembagaan yang masing-masing merasa mapan. Saling mencurigai, kekawatiran berkurangi hak dan

kebebasan yang dirasakan sudah melekat pada lembaganya sendiri; atau yang tercermin dalam ungkapan keangkuhan kelembagaan. Kondisi yang anti kemapanan ini sangat merugikan, karena dari saling keterbukaan sebenarnya dapat diupayakan kerjasama yang saling menguntungkan. Untuk ini diperlukan wawasan yang luas, serta sikap yang positif terhadap setiap inovasi; semua itu dapat diupayakan lewat banyak strategi.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat untuk Menunjang Implementasi Kebijakan *Link and Match*

1. Kelompok Sasaran

Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, ataupun oleh badan/lembaga. Sehubungan dengan hal itu perlu digali dan dikerahkan peran serta dari perorangan, kelompok ataupun badan/lembaga dalam implementasi kebijakan *link and match* sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Potensi ini misalnya dapat berupa:

- a. tenaga atau keterampilan, misalnya perajin diminati bantuannya untuk menjadi pelatih dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal;
- b. konsep dan pemikiran, misalnya dari tokoh masyarakat, pakar, perguruan tinggi;
- c. dana, misalnya dari pemerintah daerah, sektor swasta dan dunia usaha;
- d. fasilitas, misalnya dari lembaga kerja atau perusahaan yang diharapkan memberikan kesempatan untuk kunjungan, praktek, magang.

2. Pendekatan

Sesudah diidentifikasi fihak-fihak yang dipandang potensial memiliki sejumlah sumber daya untuk kepentingan pendidikan/pelatihan, penelitian, atau pelayanan pengabdian untuk menunjang implementasi *link and match*, aspek berikutnya yang perlu dipikirkan adalah bagaimana cara pengerahannya. Berbagai upaya yang ditempuh bertujuan untuk membentuk persepsi yang benar, sikap positif, kemampuan dan kemauan, mendorong terjadinya kegiatan nyata, dan komitmen yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat ditempuh berbagai cara sesuai dengan karakteristik kelompok sasarannya, misalnya melalui:

- a. berbagai forum pertemuan; kelompok kerja, satuan tugas, raker, rakor, dan sebagainya;
- b. pemasyarakatan konsep dengan mass media cetak maupun elektronik;
- c. pemberian penghargaan atas peran serta aktif;
- d. penciptaan kondisi yang memaksa (*law enforcement*), misalnya dengan pembuatan keputusan yang memiliki kekuatan hukum pada jajaran di pusat sampai dengan di daerah sesuai dengan cakupan wilayah kerjanya masing-masing.

Institusionalisasi dan Sustainability

Perintisan yang berhasil masih harus ditindaklanjuti dengan upaya agar hasil rintisan tersebut tidak tenggelam, dan bahkan berkembang secara mandiri. Kondisi masyarakat Indonesia sangat kompleks dalam pengertian sangat heterogen, unsur-unsur kehidupan modern sudah mulai banyak masuk di masyarakat, tetapi masyarakat itu sendiri belum tentu dalam keadaan siap, dan unsur-unsur kehidupan modern

sudah mulai banyak masuk di masyarakat, tetapi masyarakat itu sendiri belum tentu dalam keadaan siap, dan unsur-unsur kehidupan sebagai masyarakat tradisional tidak dapat begitu saja dihilangkan dari masyarakat. Kondisi yang demikian mengharuskan dipakainya pendekatan ganda, disamping sifat pendidikan yang *link and match* itu sendiri menghendaki cara pikir multidisipliner.

Masyarakat perlu diyakinkan bahwa *link and match* itu sendiri tidak bertentangan dengan tata nilai kultural yang diyakini. Tetapi oleh karena tetap dibutuhkan tokoh panutan, minimal persetujuan "restu" dan apabila contoh teladan dari pejabat akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat secara keseluruhan. Untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutannya diperlukan upaya yuridis sehingga rintisan memiliki dasar yang kuat untuk menjadi bagian yang rutin terpadu dari pembangunan daerah. Dengan demikian kebergantungan yang berlebihan pada pejabat/panutan yang temporer sifatnya dapat dikurangi.

Perintisan peningkatan peranserta masyarakat menunjang implementasi kebijaksanaan *link and match* dalam pembangunan pendidikan, memerlukan langkah-langkah pokok:

- a. pembentukan wadah kelembagaan yang disahkan oleh penguasa di daerah sehingga memudahkan kerjasama multi sektoral;
- b. pengaktifan fungsi dan peran;
- c. pengoptimasian kinerja dan hasil kerja melalui:
 - 1) jaringan-kerja (*networking*)
 - 2) fasilitasi
 - 3) penyiapan aparat pelaksana
 - 4) pengkoordinasian.

Konklusi

Berikut ini disajikan beberapa konklusi yang dapat ditarik dari ulasan singkat tentang peran serta masyarakat menunjang implementasi kebijaksanaan pendidikan yang *link and match*.

1. Implementasi kebijaksanaan *link and match* membutuhkan penggalangan peran serta masyarakat dan sumberdaya pendidikan dari sumber-sumber non pemerintah, oleh karena:
 - a. perlunya *community needs based program development*;
 - b. dalam merintis desentralisasi perlu meningkatkan kemampuan peran serta masyarakat.
2. Diperlukan kebijaksanaan operasional yang memungkinkan peran serta masyarakat:
 - a. terpadu dengan sistem dan proses kebijakan;
 - b. akses kesempatan untuk meningkatkan input serta proses dari implementasi Sistem Pendidikan Nasional, pada level mikro maupun makro, yang secara teoritik/konseptual dapat dipertanggungjawabkan.
3. Instusionalisasi dan pengupayaan keberlanjutan peran serta masyarakat menunjang kebijaksanaan *link and match* memerlukan a. pendekatan multi disiplinair, dan b, institusional building yang dinamis, continuous research and development.

Daftar Referensi

Anonim. (1993). *Keterkaitan dan Kesepadanan antara Pendidikan dan Pembangunan*

GBHN 1983

Hasil Rapat Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
1994

PELITA VI

PP no. 39 tahun 1992

Shaeffer, Sheldon (Ed.). (1992). *Collaborating for Educational Change: the roles of teachers, parents and the community in school improvement* Paris: IIEP

Soediyarto (1993). *Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional yang Terkait (Link) dan Sepadan (Match) dengan Tuntutan Perkembangan Masyarakat*